

Ekspresi Keresahan Pemuda melalui Media Sosial: Studi Kritik terhadap Narasi Indonesia Gelap

Expression of Youth Unrest through Social Media: A Critical Study of the Dark Indonesia Narrative

Angela Clairine

Universitas Jember
angelaclairine77@gmail.com

Eithar Indah Dwi Lestari*

Universitas Jember
itarindah@gmail.com

Erica Natasha Wiyono

Universitas Jember
erica.natasha55@gmail.com

Muhamman Wildan R

Universitas Jember
walimuhammadwildanramadhani@gmail.com

Abstract

The hashtag Indonesia Gelap is a phenomenon that describes the outpouring of disappointment from the community, especially the youth, towards policies made by the Prabowo-Gibran government, which are considered not pro-community interests and welfare. This phenomenon has developed into a cultural expression in the form of digital criticism in the form of hashtags and demonstrations as a response to perceived structural inequality. This study aims to examine the forms of expression of youth unrest through social media and collective movements, using the literature study method and the relative deprivation theory approach from Ted Gurr. The focus of the analysis is directed at the gap between the expectation of a decent life and the political reality that narrows the space for actualization of the younger generation. The results of the study show that social media is not only a medium of expression, but also an arena for symbolic consolidation that encourages real action. The emergence of hashtags such as #Narasi Indonesia Gelap, #KaburAjaDulu is a form of irony as well as resistance to the official state narrative. This study recommends the importance of formulating policies that are responsive to youth aspirations, as well as the need for open dialogue to reduce the distance between the state and citizens.

Keywords: *Ekspresion disappointment, youth movement, prosperity, collective*



Abstrak

Tagar Indonesia Gelap merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan luapan kekecewaan dari masyarakat terutama para pemuda terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, dianggap tidak pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena tersebut berkembang menjadi ekspresi kultural dalam bentuk kritik digital berupa tagar dan aksi demonstrasi sebagai respon atas ketimpangan struktural yang dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk ekspresi keresahan pemuda melalui media sosial dan gerakan kolektif, dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan teori relative deprivation dari Ted Gurr. Fokus analisis diarahkan pada kesenjangan antara harapan hidup layak dan kenyataan politik yang mempersempit ruang aktualisasi generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga arena konsolidasi simbolik yang mendorong aksi nyata. Munculnya tagar seperti *#Narasi Indonesia Gelap*, *#KaburAjaDulu* menjadi wujud ironi sekaligus perlawanan terhadap narasi resmi negara. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya formulasi kebijakan yang responsif terhadap aspirasi pemuda, serta perlunya ruang dialog yang terbuka guna mereduksi jarak antara negara dan warga.

Kata kunci: ekspresi kekecewaan, gerakan pemuda, kesejahteraan, aksi kolektif

Pendahuluan

Tagar Indonesia Gelap (*#IndonesiaGelap*) mulai menjadi kontroversial di media sosial “X” tepatnya pada hari Senin, 17 Februari 2025. Letak kontroversialnya berada pada saat tagar tersebut menduduki posisi pertama pada media sosial “X” yang mencapai jumlah postingan sebesar 81.900 cuitan¹. Tagar *Indonesia Gelap* ini dipakai di media sosial khususnya para pemuda-pemudi untuk menunjukkan ekspresi kekhawatiran para anak muda akan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Pasalnya, setelah 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru menjabat di pemerintahan yaitu Prabowo dan Gibran, mereka telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anak-anak muda rasa “tidak memihak kepentingan rakyat”. Tagar *Indonesia Gelap* ini tidak hanya kontroversial di media sosial saja, namun para mahasiswa banyak yang turun ke jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi dan memberikan tuntutan-tuntutan pada pemerintah.

Pada berita Tempo², memaparkan berbagai tuntutan yang dilayangkan mahasiswa pada pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu terdapat tuntutan untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi desakan dari mahasiswa kepada pemerintah terkait kebijakan pemangkasan anggaran terutama di bidang pendidikan yang dirasa tidak berpihak pada rakyat dan menurunkan kualitas pendidikan Indonesia, tuntutan menolak pasal RUU Minerba terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi yang

¹ Mahendra, K., “Menilik Asal Usul Tagar Indonesia Gelap Yang Trending Di X,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/politik/menilik-asal-usul-tagar-indonesia-gelap-yang-trending-di-x-1209005>.

² Hamidah, H., “Daftar Panjang Tuntutan Mahasiswa Untuk Prabowo Dalam Aksi Indonesia Gelap,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-panjang-tuntutan-mahasiswa-untuk-prabowo-dalam-aksi-indonesia-gelap-1209055>.

dirasa merusak lingkungan akademik kampus dan mencampur adukan urusan politik dan pendidikan. Kemudian, terdapat tuntutan untuk melakukan evaluasi secara total pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras banyak anggaran APBN dan memotong anggaran pendidikan pula, terdapat tuntutan untuk pengkajian ulang pada pemotongan anggaran terkhusus anggaran pendidikan yang dirasa berdampak pada terhambatnya tumbuh kembang pendidikan di perguruan tinggi, apalagi efisiensi yang dilakukan bukan untuk program yang sifatnya prioritas malah digunakan untuk program MBG. Ada program yang seharusnya mendapat perhatian lebih seperti program pendidikan gratis, dsb. Selain tuntutan diatas, ada pula tuntutan lain seperti segera menerbitkan Perppu Perampasan Aset yang telah tertunda lama dan tidak ada kejelasan dari DPR. Kemudian, dilanjutkan tuntutan untuk Tukin para Dosen dan ASN bisa segera dicairkan.

Dilanjutkan tuntutan untuk berhenti membuat kebijakan tanpa didasari riset yang tidak difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Tuntutan terakhir adalah perlu adanya efisiensi kinerja pada Kabinet Merah Putih dan menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan dimana mahasiswa mendukung pendidikan gratis, penghapusan peran ganda militer di pemerintahan, dan reformasi kepolisian³. Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan pada pemerintahan, tidak semata-mata hanya ekspresi khawatir saja, namun anak muda juga merasa kecewa dan tidak puas akan kinerja dari pemerintahan yang bisa dikatakan masih “seumur jagung” (baru 100 hari menjabat). Kekecewaan, kekhawatiran, dan ketidakpuasan inilah yang menggerakkan anak muda untuk membentuk gerakan *Indonesia Gelap* sebagai simbol perlawanan. Gerakan yang dijalankan oleh anak-anak muda dan masyarakat, menjadi penanda bahwa posisi negara yang seharusnya memihak rakyat, memprioritaskan kesejahteraan rakyat, dan memberikan solusi atas permasalahan hidup rakyat, malah menempatkan posisinya berlawanan dengan rakyat melalui kebijakan yang dirasa menyerang dan kurang pro terhadap kondisi kehidupan rakyatnya. Terlebih lagi, pemerintahan yang baru (Prabowo-Gibran) dirasa tidak maksimal dalam melayani rakyatnya.

Tidak maksimalnya kinerja pemerintah yang baru, sering kali disebabkan oleh kebijakan yang dibuat tidak didasarkan oleh penelitian secara dalam, terkait permasalahan

³ Hamidah, H., “Daftar Panjang Tuntutan Mahasiswa Untuk Prabowo Dalam Aksi Indonesia Gelap,” *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-panjang-tuntutan-mahasiswa-untuk-prabowo-dalam-aksi-indonesia-gelap-1209055>.

rakyat sampai tahap mencari akar permasalahan yang sebenarnya⁴. Dengan demikian, akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang dirasakan anak muda. Bentuk kekecewaan itu tidak hanya pada Gerakan Indonesia Gelap dan penggunaan tagar *#IndonesiaGelap* di media sosial saja, namun timbul respon lain berupa munculnya tagar baru yaitu *"KaburAjaDulu"*. Pada tagar *#KaburAjaDulu* ini bentuk keinginan dari anak muda yang dihadapkan pada situasi politik yang rancu, sehingga mereka berkeinginan untuk kabur ke luar negeri untuk bekerja atau belajar. Respon ini muncul sebagai bentuk tindakan kritis, sindiran, dan rasa geram pada pemerintahan yang dirasa sudah tidak bisa dipercaya sepenuhnya⁵.

Perasaan geram ini dapat dicontohkan pada berita *Tempo*, memberitakan bahwa terjadi demo mahasiswa Jogja yang bergabung dengan Aktivis Jogja Memanggil untuk melakukan kecaman dan tuntutan pada Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Aksi demo ini melumpuhkan lalu lintas di daerah Malioboro, dan mengepung Gedung Agung Yogyakarta yang saat itu dijaga ketat oleh TNI dan polisi. Bahkan, mahasiswa dan aktivis Jogja membentangkan spanduk yang bertuliskan sindiran-sindiran dan kritikan berbahasa Jawa yaitu "Rakyat Marah", "Oke Gas Ndasmu", "Rakyat Berdaulat", Bubarkan Kabinet Merah Putih, Ben Duties Cah-Cah". Tak hanya tulisan saja, namun pada spanduk yang dibawa juga terdapat gambar tokoh-tokoh pemerintahan, yang diberikan tanduk pada kepalanya seperti layaknya iblis⁶. Kurang lebih seperti itulah tulisan-tulisan dan gambar sebagai bentuk kegeraman dan kemarahan dari anak-anak muda pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kritikan dan sindiran pedas memanfaatkan media seni dalam bentuk apapun tidak hanya terjadi di Indonesia, nyatanya di luar negeri juga sering ditemukan seperti Rusia dan Amerika Serikat. Dalam konteks tagar *Indonesia Gelap* ini, mahasiswa dan aktivis Jogja menggunakan keterampilan seni berbahasa Jawa untuk menyampaikan kritikan dan sindiran pedas mereka. Serupa dengan yang terjadi di Indonesia, di Rusia menggunakan seni musik untuk mengkritik rezim pemerintahan Vladimir Putin yang kemudian menggerakkan suatu gerakan sosial. Lalu, bisa ditemukan juga di Amerika Serikat yang menggunakan seni musik

⁴ Rosa D. V., "Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru," *Mediasosial Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2330>.

⁵ Grehenson, G., "Ramai Tagar Kabur Aja Dulu, Pakar UGM: Bentuk Sikap Kritis Dan Sindiran Anak Muda Atas Situasi Di Tanah Air," Universitas Gajah Mada, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/ramai-tagar-kabur-aja-dulu-pakar-ugm-bentuk-sikap-kritis-dan-sindiran-anak-muda-atas-situasi-di-tanah-air/>.

⁶ Wicaksono, P., "Demo Di Istana Negara Yogyakarta, Mahasiswa Bentangkan Spanduk 'Rakyat Marah,'" *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/demo-di-istana-negara-yogyakarta-mahasiswa-bentangkan-spanduk-rakyat-marah--1209980>.

berupa lagu-lagu protes, untuk menyimbolkan perlawanan pada rasisme orang kulit hitam yang sering kali mendapat kekerasan brutal. Contoh seni musiknya adalah lagu berjudul *Strange Fruit* yang dipopulerkan oleh Billie Holiday⁷.

Berdasarkan pemaparan diatas ini, fenomena *Indonesia Gelap* menjadi penting dan berfokus pada gambaran kekecewaan anak muda pada kinerja pemerintahan, dimana anak muda sebagai kaum terpelajar sudah seharusnya menuntut dan menyuarakan perubahan jika menemukan adanya indikasi kebijakan yang dirasa tidak memihak rakyat. Pada fenomena *Indonesia Gelap* ini juga, menggambarkan goyah dan lunturnya kepercayaan pada pemerintahan dan munculnya respon *#KaburAjaDulu*, serta tindakan-tindakan demo yang anak muda lakukan setelah sadar akan suram dan gelapnya kondisi politik yang terjadi di negaranya. Teori deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Ted Gurr menjadi kerangka analisis utama untuk menjelaskan bahwa ketimpangan antara harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik dengan realitas sosial yang penuh keterbatasan dapat memicu kemarahan kolektif dan tindakan protes. Harapan pemuda terhadap demokrasi yang adil dan kebijakan yang inklusif tidak sejalan dengan praktik politik yang mereka saksikan, sehingga memicu frustrasi yang kemudian diekspresikan melalui media sosial dan aksi massa. Dengan demikian, muncul pertanyaan yang disoroti untuk dibahas pada penelitian ini yaitu, bagaimana fenomena *Indonesia Gelap* mencerminkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi harapan pemuda terhadap demokrasi dan keadilan sosial. Hal inilah yang akan dibahas secara lebih terperinci dan mendetail pada penelitian kali ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis ekspresi keresahan pemuda melalui media sosial terhadap narasi "*Indonesia Gelap*". Dalam metode studi pustaka ini kami menggunakan langkah-langkah yang meliputi identifikasi isu utama, pengumpulan sumber literatur, artikel, serta dokumentasi di media sosial untuk membantu peneliti dalam memahami bentuk-bentuk kritik sosial dari anak muda muncul dan berkembang di ruang digital. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap bagaimana media sosial menjadi wadah sekaligus alat bagi anak muda untuk menyampaikan kritik, kekecewaan, hingga gerakan sosial berupa perlawanan simbolik terhadap situasi negara yang dianggap semakin tidak sesuai dengan harapan pemuda.

⁷ Kurniawan, W., "Pembungkaman Seni Dan Seni Perlawanan," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/teroka/pembungkaman-seni-dan-seni-perlawanan-1215479>.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang tema gerakan pemuda melalui kritik terhadap narasi *Indonesia Gelap*. Sumber yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah. Sumber tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji perspektif teoritis dan konseptual berkaitan dengan masalah sosial, gerakan pemuda, kritik terhadap sistem yang ada, peran media digital, serta pengembangan narasi kebangsaan. Di samping itu, informasi juga berasal dari dunia digital, khususnya media sosial. Konten-konten yang muncul selama periode 2020 hingga 2024 menjadi fokus utama. Fokus tersebut ditunjukkan pada hashtag-hashtag terkenal seperti *#IndonesiaGelap*, *#ReformasiDikorupsi*, *#KaburAjaDulu*, dan berbagai bentuk ekspresi digital lain yang mencerminkan kritik dari anak muda terhadap situasi sosial dan politik di Indonesia. Sumber tambahan diambil dari artikel berita dan opini yang dipublikasikan oleh media online nasional. Media seperti *Kompasiana*, *Tempo. co*, *IDN Times*, serta publikasi internasional seperti *Financial Times* digunakan sebagai referensi untuk meneliti bagaimana narasi "*Indonesia Gelap*" disajikan dalam berita, serta bagaimana media merefleksikan dinamika gerakan pemuda dalam menyuarakan kritik sosial.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui sumber yang membahas tentang tema melalui penyusunan dan pengelompokan berdasarkan topik yang dibahas, jenis sumber, rentang waktu, serta relevansi terhadap fokus penelitian, peneliti melakukan pengamatan di media sosial untuk mengidentifikasi postingan yang menggunakan tagar dan kata kunci yang berhubungan dengan kritik sosial serta gerakan pemuda. Proses ini dipermudah oleh fitur pencarian lanjutan yang tersedia di masing-masing platform untuk memastikan data yang dikumpulkan lebih terarah dan sesuai dengan rentang waktu penelitian. Dengan pengelompokan ini, data yang tersedia menjadi lebih teratur dan mempermudah proses analisis. Metode pengumpulan data seperti ini sangat membantu dalam memperoleh pandangan yang luas mengenai bagaimana gerakan pemuda menyampaikan kritik sosial melalui platform digital.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurr sebagai landasan utama dalam menganalisis makna sosial dari ekspresi kritik yang teridentifikasi. Teori ini mengemukakan bahwa ketidakpuasan sosial muncul akibat adanya jurang antara harapan yang tinggi dengan keadaan sosial yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan rasa tidak adil dan kekecewaan di kalangan generasi muda. Untuk menyelidiki fenomena "*Indonesia Gelap*" sebagai bentuk kritik sosial, penelitian ini mengacu pada beberapa indikator dari teori tersebut, seperti persepsi ketidakadilan yang dialami oleh

pemuda terkait situasi sosial dan pemerintahan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan, serta tingkat kekecewaan yang memotivasi pemuda untuk mengungkapkan ketidakpuasan melalui berbagai bentuk kritik sosial. Aktivitas kritik ini dapat berupa penggunaan tagar di media sosial, turut serta dalam diskusi atau gerakan sosial, dan bentuk protes lainnya. Dengan memanfaatkan indikator-indikator tersebut, analisis tidak hanya berfokus pada konten kritik, tetapi pada akar sosial dan psikologis yang mendasari gerakan pemuda, sehingga fenomena "*Indonesia Gelap*" dipahami sebagai kritik yang berakar pada ketidakpuasan struktural, bukan sekadar sebuah trend yang viral di dunia maya.

Hasil dan pembahasan

Simbol Kekecewaan Kolektif: Antara Harapan Sosial dan Respons Negara

Berdasarkan sejumlah artikel media massa dan analisis, tampak bahwa kebijakan pemerintah Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, khususnya generasi muda. Munculnya tagar *#IndonesiaGelap* dan *#KaburAjaDulu* menjadi simbol protes yang mencerminkan keresahan sosial yang mendalam. Tagar *#IndonesiaGelap* dimaknai oleh kelompok mahasiswa sebagai bentuk kecemasan terhadap masa depan bangsa dan ketidakpuasan atas arah kebijakan negara⁸. Tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut mencakup penolakan terhadap kebijakan kontroversial, desakan atas transparansi publik, dan kritik terhadap program pemerintah seperti makan gratis yang dianggap tidak tepat sasaran⁹. Berdasarkan analisis Drone Emprit mengenai 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto, terdapat perbedaan mencolok antara sentimen di media online dan media sosial. Media online menunjukkan sentimen positif sebesar 93%, sedangkan media sosial didominasi oleh sentimen negatif sebesar 78%. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara citra yang dibangun pemerintah melalui media dan persepsi masyarakat di media sosial. Isu-isu yang menjadi sorotan utama warganet meliputi kebijakan ekonomi seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kebijakan PPN 12% dianggap memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, karena menurunkan daya beli. Program MBG mendapat kritik terkait

⁸ Hamidah, H., "Daftar Panjang Tuntutan Mahasiswa Untuk Prabowo Dalam Aksi Indonesia Gelap," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-panjang-tuntutan-mahasiswa-untuk-prabowo-dalam-aksi-indonesia-gelap-1209055>.

⁹ Mahendra, K., "Menilik Asal Usul Tagar Indonesia Gelap Yang Trending Di X," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/menilik-asal-usul-tagar-indonesia-gelap-yang-trending-di-x-1209005>."

kualitas makanan dan efektivitasnya dalam mengatasi gizi buruk. Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat menimbulkan kekhawatiran akan penurunan demokrasi¹⁰.

Meskipun survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, banyak warganet yang merasa tidak puas dengan kinerja beberapa menteri dan kebijakan pemerintah. Kementerian BUMN mendapat pujian atas program pembangunan rumah dan MBG, sementara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koperasi mendapat kritik tajam karena dianggap lambat dalam menangani pelanggaran HAM dan kurang transparan. Menteri Kehutanan juga mendapat kritik dan spekulasi mengenai reshuffle kabinet. Percakapan publik mengenai 100 hari pemerintahan Prabowo memuncak pada 21 Januari 2025 dengan lebih dari tiga ribu mentions dan lebih dari 788 juta interaksi. Kelompok pro-pemerintah menyoroti hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik dan kebijakan positif, sementara kelompok kritis fokus pada kritik terhadap kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, dan kinerja menteri yang dianggap gagal. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berhasil membangun citra positif melalui media online, masih terdapat ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat yang terungkap melalui media sosial. Hal ini menandakan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat¹¹.

Sementara itu, tagar *#KaburAjaDulu* mencerminkan frustrasi generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Banyak anak muda mengungkapkan keinginan untuk bekerja di luar negeri karena merasa negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta prospek masa depan yang menjanjikan.¹² Fenomena ini menandakan adanya *relative deprivation* atau ketimpangan antara harapan nilai dan kemampuan nilai sebagaimana dijelaskan oleh Gurr. Dalam teorinya, Gurr menyatakan bahwa semakin besar kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan masyarakat, khususnya terhadap nilai-nilai yang dianggap penting (seperti ekonomi, keamanan, dan partisipasi), maka semakin tinggi intensitas kekecewaan dan potensi timbulnya aksi kolektif¹³.

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, merespon kritik ini dengan menyebut bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan akan menjadi terbesar keempat dunia

¹⁰ Rahman, A., "100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo," Drone Emprit Publication, 2024, <https://pers.droneemprit.id/100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo/>.

¹¹ Rahman, A., "100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo," Drone Emprit Publication, 2024, <https://pers.droneemprit.id/100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo/>.

¹² Marciano, H., "Kabur Aja Dulu, Bentuk Frustrasi Generasi Muda Terhadap Kondisi Bangsa," SBM ITB, 2025, <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/02/21/kabur-aja-dulu>.

¹³ Gurr T. R., *Why Men Rebel (1st Ed.)* (Routledge, 2010).

pada tahun 2050 berdasarkan kajian Goldman Sachs¹⁴. Namun, narasi optimisme ini dianggap oleh banyak pihak tidak menjawab masalah keseharian yang dirasakan masyarakat saat ini, seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan tekanan hidup generasi produktif. Dalam teori Gurr, klaim pertumbuhan jangka panjang tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak hanya akan memperbesar jurang antara ekspektasi dan realitas, sehingga meningkatkan potensi ketidakstabilan sosial¹⁵. Dengan demikian, respon pemerintah yang berorientasi pada narasi makro ekonomi tidak cukup untuk meredakan keresahan sosial yang berakar dari *relative deprivation*. Protes juga dapat dipicu oleh kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik dan ekonomi kurangnya peluang menyebabkan keterlibatan dalam kekerasan dan ekstremisme¹⁶. Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih konkret dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat untuk meredam gejala kekecewaan kolektif yang bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Kebijakan yang bersifat simbolis atau janji jangka panjang tanpa realisasi nyata dalam jangka pendek justru berpotensi memperburuk persepsi ketidakadilan dan mendorong radikalisasi ketidakpuasan publik¹⁷.

Pada sebuah artikel berjudul “*Kebijakan Pemerintah Tentang Kelengkapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perlindungan Hukumnya Bagi TKI Informal yang akan Keluar Negeri*”¹⁸, terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam konteks sertifikasi kompetensi TKI belum sepenuhnya menyentuh inti persoalan yang dialami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Meskipun kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memberikan perlindungan bagi TKI informal, dalam praktiknya sertifikasi yang diberikan tidak diakui oleh negara-negara tujuan, sehingga tidak memberikan daya tawar yang nyata bagi TKI Indonesia di pasar kerja global. Situasi ini dapat dikaitkan secara langsung dengan fenomena sosial yang diangkat melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu. Tagar tersebut mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar seperti lapangan kerja layak, pendidikan

¹⁴ Riyandanu, M. F., “Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul "Prabowo Tepis Narasi Indonesia Gelap, Sebut Ekonomi RI Bakal Jadi Terbesar Ke-4". <https://katadata.co.id/berita/nasional/67be698c20898/Prabowo-Tepis-Narasi-Indonesia-Gelap-Sebut-Ekonomi-Ri-Bakal-J>,” Katadata, 2025,

¹⁵ Gurr T. R., *Why Men Rebel (1st Ed.)* (Routledge, 2010).

¹⁶ Akinyetun T. S., Bakare, K., & Adedini, S. O., “Youth and Peacebuilding: Policy Implications of Conflict Resolution in Africa,” *Journal of Contemporary Sociological Issues* 3, no. 1 (2023): 68, <https://doi.org/10.19184/csi.v3i1.31263>.

¹⁷ Gurr T. R., *Why Men Rebel (1st Ed.)* (Routledge, 2010).

¹⁸ Rusmana, D., “Kebijakan Pemerintah Tentang Kelengkapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perlindungan Hukumnya Bagi TKI Informal Yang Akan Keluar Negeri,” *Jurnal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 386–406, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.899>.

terjangkau, dan jaminan masa depan (Hamidah, 2025; ¹⁹ Marciano, 2025)²⁰. Dalam hal ini, program sertifikasi TKI yang bersifat teknokratis tampak tidak menyentuh permasalahan struktural seperti ketimpangan kesempatan kerja di dalam negeri yang mendorong eksodus tenaga kerja ke luar negeri.

Ditinjau lebih jauh kebijakan ini mencerminkan kesenjangan antara harapan (akses kerja layak dan perlindungan sosial) dan realitas (minimnya pengakuan global, lemahnya perlindungan, dan keterbatasan sistem pelatihan). Ketika kebutuhan dasar seperti jaminan kerja, penghasilan, dan keamanan tidak terpenuhi, sementara narasi resmi negara hanya menonjolkan indikator makroekonomi seperti proyeksi PDB tahun 2050, hal ini justru memperluas jurang antara ekspektasi dan realitas sosial, yang pada gilirannya memicu frustrasi kolektif dan kemungkinan radikalisasi tuntutan public ²¹. Kebijakan pemerintah dalam sektor pangan, seperti ditekankan dalam kajian swasembada beras ²², meskipun lebih terstruktur melalui program-program seperti P2BN dan UPSUS Pajale, juga menunjukkan pola yang sama: fokus pada aspek produksi dan target nasional tanpa menyesuaikan cukup dalam terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal, terutama ketahanan petani dan keberlanjutan jangka panjang. Kelemahan dalam integrasi kebijakan ini dengan dinamika sosial—seperti konversi lahan, biaya input tinggi, hingga kurangnya partisipasi petani—menggarisbawahi adanya *top-down approach* yang kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Kesenjangan Kapabilitas dan Potensi Ketegangan Struktural

Menurut beberapa artikel, Indonesia digadang-gadang akan memiliki bonus demografi dengan lebih dari 44 juta penduduk berusia 15–24 tahun, sekitar 16% dari total populasi²³. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan jumlah penduduk bekerja hingga 144,64 juta jiwa pada Agustus 2024, dengan kenaikan pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi ²⁴. Namun, di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pemuda mencapai 17,3%, jauh di atas rata-rata nasional 4,9%. Kutipan data tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat, khususnya pemuda, memiliki kapabilitas yang

¹⁹ Hamidah, H., “Daftar Panjang Tuntutan Mahasiswa Untuk Prabowo Dalam Aksi Indonesia Gelap,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-panjang-tuntutan-mahasiswa-untuk-prabowo-dalam-aksi-indonesia-gelap-1209055>.

²⁰ H., “Kabur Aja Dulu, Bentuk Frustrasi Generasi Muda Terhadap Kondisi Bangsa.”

²¹ Gurr T. R., *Why Men Rebel (1st Ed.)* (Routledge, 2010).

²² Budiman, N. D., & Santu, L., “Kajian Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai Target Swasembada Beras,” *Paradigma Jurnal Sosial Politik Dan Kebijakan* 21, no. 2 (2024): 125–36.

²³ Mariska, D., & Lakshmi A., “Students Stage ‘Dark Indonesia’ Protests as Prabowo Subianto’s Spending Cuts Hit Education,” Financial Times, 2025, <https://www.ft.com/content/288c3985-8986-4932-a2fe-a0cdd6d1e51b>.

²⁴ Prastiwi M., “Data BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Meningkat, Dari Sekolah Menengah, D4-S3,” Kompasiana, 2024, <https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/06/165245871/data-bps-jumlah-penduduk-bekerja-meningkat-dari-sekolah-menengah-d4-s3>.

tinggi, pasti menghadapi tantangan besar dalam mengakses peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, serta kurangnya lapangan pekerjaan berkualitas, menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi generasi muda.

Hari ini, generasi muda bukan sekadar objek pembangunan, tapi aktor perubahan. Generasi muda memiliki kapabilitas tinggi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertahan dalam dunia kerja yang makin fleksibel dan digital. Masyarakat harus terus membangun literasi digital dan soft skill untuk menghadapi dunia kerja berbasis teknologi. Namun dukungan sistemik dari negara masih minim²⁵. Sayangnya, kapabilitas tinggi ini tidak berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah yang memfasilitasi atau mempercepat laju tersebut. Generasi muda Indonesia hari ini, meski hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial, adalah generasi yang tercerahkan. Pemuda melek teknologi, terhubung secara global, serta memiliki aspirasi untuk hidup bermartabat. Dalam bahasa yang lebih lugas: pemuda tahu dunia ini bisa lebih baik dan pemuda tahu bahwa negara tidak cukup membantu para pemuda ke arah sana.

Masyarakat sering memilih untuk menjauh dari negara sebagai bentuk perlawanan dan strategi politik. Dengan cara ini, mereka menanggalkan keterlibatan langsung dalam sistem yang dianggap tidak mewakili kepentingannya. Perlawanan tersebut bisa jadi simbolik, menyesuaikan dengan situasi lokal dan wilayah adat yang dipertahankan²⁶. Taktik serupa terlihat dalam gerakan *#KaburAjaDulu* yang muncul di kalangan pemuda Indonesia. Kritik terhadap narasi "*Indonesia Gelap*" menunjukkan ketidakpercayaan terhadap negara, dengan banyak pemuda memilih untuk "kabur" sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang tak memenuhi harapan para pemuda. Fenomena *#KaburAjaDulu*, Narasi *Indonesia Gelap* menggambarkan hal ini dengan gamblang. Alih-alih percaya dengan narasi optimistis pemerintah, anak-anak muda memilih mencari peluang di luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh SBM ITB dalam risetnya: Tagar ini bukan sekadar guyonan digital, tapi bentuk konkret frustrasi generasi muda terhadap kemapanan sistem yang gagal menjawab kebutuhannya²⁷. Generasi muda tidak anti-nasionalis, tapi hanya jenuh dengan jargon dan

²⁵ Juwita, R., & Kardinal K., "Pekerja VS Dunia Kerja Berbasis 4.0," *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 10, no. 2 (2021): 190–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/forbiswira.v10i2.810>.

²⁶ Prasetyo, H., Rosa D. V., & Sari, R., "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat Tengger," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 2 (2023): 124–30, <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/101>.

²⁷ Marciano, H., "Kabur Aja Dulu, Bentuk Frustrasi Generasi Muda Terhadap Kondisi Bangsa," SBM ITB, 2025, <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/02/21/kabur-aja-dulu>.

janji kosong. Kapabilitas pemuda untuk berpikir, merencanakan hidup, dan berani mengambil risiko, termasuk meninggalkan tanah air merupakan sinyal kuat dari adanya disfungsi kebijakan nasional.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa kebijakan yang diambil justru menuai kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai \$28 miliar per tahun, misalnya, sebaiknya dievaluasi lagi akibat adanya pemangkasan anggaran pada sektor lainnya (Riyandanu, 2025)²⁸. Kebijakan pemangkasan anggaran yang dibungkus narasi efisiensi ternyata menghantam sendi-sendi kehidupan rakyat. Yang paling disayangkan, sektor pendidikan yang semestinya jadi fondasi kemajuan bangsa malah dikorbankan demi memenuhi agenda politik yang bersifat sementara. Mahasiswa di berbagai daerah, seperti Palembang dan Sumatera Barat, menggelar aksi "*Indonesia Gelap*" sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat²⁹. Kebijakan dibangun bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan atas prioritas yang ditentukan secara top-down oleh elit penguasa. Kritik juga datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan akademisi, yang menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran justru memperburuk kondisi masyarakat. Masyarakat merasa pemotongan anggaran berdampak pada hilangnya pekerjaan dan menurunnya kualitas layanan publik.

Gerakan "*Indonesia Gelap*" sebagai bentuk artikulasi keresahan mahasiswa atas apa yang mereka nilai sebagai negara yang hanya menerangi kelompok tertentu. Narasi tersebut tidak hanya menunjuk kegagalan distribusi sumber daya, tetapi juga mempermasalahkan representasi demokrasi itu sendiri. Mahasiswa tidak lagi percaya bahwa mereka diwakili oleh parlemen, apalagi oleh elite partai. *Indonesia Gelap* bukan soal pesimisme, tapi soal keberanian mengungkap bahwa demokrasi sedang kehilangan cahaya substansinya: keadilan sosial³⁰. Gerakan tersebut lahir bukan dari ruang kosong. Ia tumbuh karena masyarakat merasa memiliki potensi, tetapi negara tidak hadir sebagai fasilitator. Kapabilitas masyarakat justru menjadi ancaman bagi sistem politik yang tertutup.

Tabel 1.1. Kategori temuan dan analisis

²⁸ Riyandanu, M. F., "Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul "Prabowo Tepis Narasi Indonesia Gelap, Sebut Ekonomi RI Bakal Jadi Terbesar Ke-4", <https://katadata.co.id/Berita/Nasional/67be698c20898/Prabowo-Tepis-Narasi-Indonesia-Gelap-Sebut-Ekonomi-Ri-Bakal-J>," Katadata, 2025.

²⁹ Efrizal, R., "Indonesia Gelap, Mahasiswa Palembang Kritik 100 Hari Prabowo-Gibran," *IDM Times*, 2025, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/indonesia-gelap-mahasiswa-palembang-kritik-100-hari-prabowo-gibran>.

³⁰ Ita, A., "Gerakan Indonesia Gelap: Analisis Tuntutan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintahan Baru 2025," *Academiaedu*, 2025, <https://www.academia.edu/127878855>.

Kategori	Data / Temuan	Deprivasi
Ketimpangan antara harapan dan kenyataan	#IndonesiaGelap menyuarakan kecemasan mahasiswa	<i>Aspirational Deprivation</i>
Ekspektasi tinggi yang gagal terpenuhi	Program MBG dan PPN 12% dikritik	<i>Decremental Deprivation</i>
Perbedaan persepsi antara media dan masyarakat	Media online positif, medsos negatif	<i>Discrepancy Between Image and Experience</i>
Kekecewaan terhadap peluang ekonomi dan sosial	#KaburAjaDulu muncul akibat minimnya peluang kerja	<i>Relative Deprivation</i> (Ekonomi dan Status)
Ketimpangan antara pendidikan dan kesempatan kerja	Pengangguran pemuda tinggi meski terdidik	<i>Discrepancy Between Capabilities and Value Attainment</i>
Ketidakpuasan terhadap respons negara	Narasi 2050 tidak menjawab persoalan harian	<i>Symbolic Policy vs. Real Demand</i>
Kurangnya partisipasi dan keterwakilan	Mahasiswa merasa tidak diwakili elite politik	<i>Participation Value Deprivation</i>
Program teknokratis yang tidak efektif	Sertifikasi TKI tidak diakui luar negeri	<i>Ineffective Institutional Response</i>
Ketimpangan kapabilitas dan respons negara	Generasi muda tidak difasilitasi sistem	<i>Blocked Aspirations</i>
Respon masyarakat terhadap stagnasi negara	#KaburAjaDulu sebagai bentuk exit	<i>Exit Strategy as Political Protest</i>
Potensi radikalisasi	Kebijakan simbolik tanpa realisasi	<i>Accumulated Relative Deprivation</i>

Sumber: Data peneliti

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa cara pemuda mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui media sosial, terutama dengan tagar *#IndonesiaGelap* dan *#KaburAjaDulu*, merupakan bentuk respon kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, khususnya generasi muda. Narasi “*Indonesia Gelap*” tidak sekadar menjadi sebuah kritik simbolis, tetapi juga menjadi wadah bagi politik kultural yang menggambarkan ketegangan antara harapan masyarakat dan realitas sosial-politik yang dihadapi oleh pemuda Indonesia setelah 100 hari pemerintahan yang baru. Analisis kritis menunjukkan bahwa di balik penggunaan tagar, meme, konten di media sosial yang terlihat, ada struktur wacana yang mencerminkan rasa kecewa, ketidakpercayaan, serta keinginan untuk mempertanyakan keabsahan negara sebagai penyedia layanan publik.

Dengan memanfaatkan teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurr, ditemukan semakin besar kesenjangan antara harapan generasi muda mengenai kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipasi politik dengan keadaan yang dialami seperti masalah pengangguran, pemangkasan anggaran pendidikan, dan kebijakan populis yang tidak berbasis riset. Sehingga semakin besar pula kemungkinan timbulnya ekspresi sosial yang bersifat kolektif, bahkan dapat berkembang menjadi gerakan simbolis untuk menjauh dari negara, seperti fenomena *#KaburAjaDulu*. Dalam konteks ini, negara tidak hanya gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar pemuda, tetapi juga tidak mampu menciptakan ruang partisipasi yang transparan dan responsif terhadap suara masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan terhadap negara tidak muncul tanpa alasan, tetapi disebabkan oleh lemahnya kemampuan negara dalam memahami dan menangani harapan sosial yang terus berubah di tengah masyarakat digital.

Kesimpulan dari penelitian ini tidak hanya mengindikasikan adanya rasa resah, melainkan juga menggarisbawahi bahwa generasi muda mempunyai kesadaran politik yang semakin tinggi serta keberanian untuk menyampaikan kritik di ruang publik digital. Media sosial telah berperan sebagai alternatif yang memungkinkan pemuda untuk menciptakan wacana tandingan terhadap narasi resmi yang disampaikan oleh negara. Oleh karena itu, negara seharusnya menganggap kritik ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sinyal penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan atau ketidakmampuan negara dalam menjawab suara pemuda dapat memperbesar kesenjangan ketidakpercayaan dan melemahkan legitimasi politik dalam jangka panjang. Dengan demikian, studi ini merekomendasikan perlunya transformasi dalam pendekatan komunikasi dan kebijakan negara agar lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda,

serta menjadikan media sosial sebagai saluran dialog yang konstruktif, bukan hanya sebagai area pengawasan simbolis.

Referensi

- Akinyetun, T. S., Bakare, K., & Adedini, S. O. (2023). Youth and Peacebuilding: Policy Implications of Conflict Resolution in Africa. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/csi.v3i1.31263>.
- Budiman, N. D., & Santu, L. (2024). Kajian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mencapai Target Swasembada Beras, 21(2), 125-136. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FP/article/view/3888>.
- Erfizal, R. (2025). Indonesia Gelap, Mahasiswa Palembang Kritik 100 Hari Prabowo-Gibran. *IDN Times*. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/indonesia-gelap-mahasiswa-palembang-kritik-100-hari-prabowo-gibran>.
- Grehenson, G. (2025). Ramai Tagar Kabur Aja Dulu, Pakar UGM: Bentuk Sikap Kritis dan Sindiran Anak Muda atas Situasi di Tanah Air. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/ramai-tagar-kabur-aja-dulu-pakar-ugm-bentuk-sikap-kritis-dan-sindiran-anak-muda-atas-situasi-di-tanah-air/>.
- Gurr, T. R. (2010). *Why men rebel* (40th anniversary ed). Paradigm Publishers.
- Hamidah, H. (2025). Daftar Panjang Tuntutan Mahasiswa untuk Prabowo dalam Aksi Indonesia Gelap. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/daftar-panjang-tuntutan-mahasiswa-untuk-prabowo-dalam-aksi-indonesia-gelap-1209055>.
- Harmiyati, H. (2021). Ledakan Amonium Nitrat: Faktor Pemicu Urgensi Perubahan Sistem Politik di Lebanon. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 25(2), 582-591. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v25i2.5328>.
- Ita, A. (2025). Gerakan Indonesia Gelap: Analisis Tuntutan Mahasiswa terhadap Kebijakan Pemerintahan Baru 2025. <https://www.academia.edu/127878855>.
- Juwita, R. & Kardinal, K. (2021). Pekerja VS Dunia Kerja Berbasis 4.0. *Jurnal Ilmiah Universitas Multi Data Palembang*, 10(2), 190-196. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/article/view/810>.
- Kurniawan, W. (2025). Pembungkaman Seni dan Seni Perlawanan. *Tempo*. https://www.tempo.co/teroka/pembungkaman-seni-dan-seni-perlawanan-1215479#google_vignette.
- Mahendra, K. (2025). Menilik Asal Usul Tagar Indonesia Gelap yang Trending di X. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/menilik-asal-usul-tagar-indonesia-gelap-yang-trending-di-x-1209005>.
- Marciano, H. (2025). Kabur Aja Dulu, Bentuk Frustasi Generasi Muda terhadap Kondisi Bangsa. *SBM ITB*. <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/02/21/kabur-aja-dulu>.
- Mariska, D. & Lakshmi, A. (2025). Students stage 'Dark Indonesia' protests as Prabowo Subianto's spending cuts hit education. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/288c3985-8986-4932-a2fe-a0cdd6d1e51b>.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Resist Book.
- Prasetyo, H., Rosa, D. V., & Sari, R. (2023). Beradab dengan Adat: Politik Identitas dalam Ritualitas Agama Masyarakat Tengger. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 124-130. <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/101>.

- Prastiwi, M. (2024). Data BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Meningkat, dari Sekolah Menengah, D4-S3. Kompasiana. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/06/165245871/data-bps-jumlah-penduduk-bekerja-meningkat-dari-sekolah-menengah-d4-s3>.
- Rahman, A. (2025). 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo. Drone Emprit Publications. <https://pers.droneemprit.id/100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo/>.
- Riyandanu, M., F. (2025). Prabowo Tepis Narasi Indonesia Gelap, Sebut Ekonomi RI Bakal Jadi Terbesar ke-4. <https://katadata.co.id/berita/nasional/67be698c20898/prabowo-tepis-narasi-indonesia-gelap-sebut-ekonomi-ri-bakal-jadi-terbesar-ke-4>.
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila dan Politik Toleransi Orde Baru. Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2330>.
- Rusmana, D. (2024). Kebijakan Pemerintah Tentang Kelengkapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perlindungan Hukumnya Bagi TKI Informal yang akan Keluar Negeri. 3(3), 385-406. Jurnal Evidence of Law. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.899>.
- Wicaksono, P. (2025). Demo di Istana Negara Yogyakarta, Mahasiswa Bentangkan Spanduk 'Rakyat Marah'. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/demo-di-istana-negara-yogyakarta-mahasiswa-bentangkan-spanduk-rakyat-marah--1209980>